

Analisis Dampak Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Jambi

Muji Lestari, SE, MA
Kepala BPS Kabupaten Bungo
Email: muji@bps.go.id

Abstrak

Keberhasilan pembangunan suatu daerah diukur dari penurunan kemiskinan secara konsisten dalam jangka panjang. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengatasi kemiskinan melalui kebijakan belanja daerah yang efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari kenaikan belanja daerah dan mengetahui jenis belanja apa saja yang efektif terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, rasio belanja daerah terhadap kesehatan, dan rasio belanja Pendidikan terhadap total belanja daerah. Hasil analisis membuktikan bahwa belanja modal dan belanja kesehatan pemerintah daerah mempunyai dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi. Peningkatan belanja modal akan mendorong proses akumulasi modal dalam peningkatan kapasitas produksi, permintaan bahan baku, perluasan kesempatan kerja, serta penciptaan nilai tambah dan pendapatan bagi masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, belanja pendidikan tidak berdampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan. Namun dalam jangka panjang kebijakan belanja pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja melalui belanja pendidikan juga berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi. Implikasi kebijakan dari hasil temuan tersebut adalah penajaman prioritas belanja daerah kepada belanja yang langsung dirasakan oleh masyarakat miskin terutama belanja modal di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu dalam upaya mempercepat pengurangan kemiskinan, pemerintah daerah harus memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk perluasan akses permodalan, teknologi, informasi dan pemasaran, serta perbaikan akses juga sarana dan prasarana kesehatan.

Kata Kunci: kemiskinan, belanja modal, belanja kesehatan dan belanja pendidikan

Abstract

To reducing poverty consistently in the long term is goal of regional development. Local governments have an obligation to overcome poverty through effective and targeted spending policies. This study aims to analyze the impact of increase in local government spending and to find out what types of spending are effective in reducing poverty in Jambi Province. The analytical method is multiple linear regression analysis, with the rate of economic growth, the ratio of capital expenditure to total regional expenditure, the ratio of regional expenditure to health, and the ratio of education expenditure to total regional expenditure as independent variables. The results proved that local government capital expenditures and health spending have a direct impact on poverty reduction in Jambi Province. The increase in capital expenditure will encourage the needed to increase production capacity, increase demand for raw materials, expand employment opportunities, and create value added and income for the poor. On the other hand, education spending do not have a significant impact on reducing poverty. But in long term, it would improve the quality of human resources and labor productivity on reducing poverty in Jambi Province. The policy implication is the priorities of local government spending by giving a larger portion that are directly benefitted to the poor, especially capital expenditures in agriculture, plantation and fishery sectors. In addition, local governments must facilitate the development of small and medium enterprises, including facilitating more access to working capital, technology, information and market, also improving on health access and infrastructure.

Keywords: *poverty, capital expenditure, health expenditure and education expenditure*

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan senantiasa menjadi perhatian utama bukan hanya dilihat dari sisi kemanusiaan, tetapi juga dari sisi kebijakan pembangunan. Dari sisi kemanusiaan, permasalahan kemiskinan merupakan salah satu kegagalan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Hal ini dipertegas dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Dalam perspektif kemanusiaan, penyebab utama kemiskinan antara lain adalah terbatasnya akses dan mutu pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perumahan, sanitasi dan air bersih; dan terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Penyebab kemiskinan lainnya adalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; memburuknya kondisi lingkungan hidup dan terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; kurangnya jaminan rasa aman; dan terbatasnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan (Bappenas, 2004)

Dari sudut pandang kebijakan publik, pembangunan suatu daerah dianggap berhasil apabila angka kemiskinan berkurang secara konsisten dalam jangka panjang. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui dan memahami kebutuhan dan standar pelayanan yang menjadi hak-hak dasar rakyat terutama rakyat miskin. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengatasi kemiskinan melalui kebijakan belanja daerah yang efektif dan tepat sasaran.

Angka kemiskinan di Provinsi Jambi terus menurun dari 12,74 persen pada tahun 2003 menjadi 7,58 persen pada tahun 2020 atau rata-rata menurun sebesar 0,14 persen pertahun. Sementara total belanja daerah terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 13,24 persen pertahun selama 2003-2020.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah kenaikan belanja daerah berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Jenis belanja apa saja yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. Tulisan ini bertujuan menjawab pertanyaan tersebut dengan mengambil kasus Provinsi Jambi.

1. Tinjauan Teori

Kajian dampak belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan dapat ditinjau dari teori pembangunan dan teori kebijakan publik. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang secara konsisten dan berkelanjutan.

Ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja pembangunan adalah pertama, meningkatnya produksi dan meratanya distribusi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan; kedua, meningkatnya pendapatan, berkurangnya kemiskinan dan kualitas hidup yang ditandai dengan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; serta ketiga, tersedianya pilihan dan kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam menentukan preferensi kehidupan sosial.

Todaro dan Smith (2006) menegaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan fungsi dari tingkat pendapatan perkapita, tingkat kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Ketiga variabel tersebut mempunyai tingkat signifikansi yang berbeda dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dengan kata lain, pembangunan suatu daerah dipandang berhasil apabila pendapatan perkapita meningkat, kesenjangan menurun dan kemiskinan berkurang.

Teori kebijakan publik yang relevan dalam memahami belanja pemerintah daerah adalah Hukum Wagner yang menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian cenderung terus meningkat (*the increasing of state activity*) (Sukartini dan Saleh (2012). Sejalan dengan meningkatnya perkembangan ekonomi suatu negara atau suatu daerah, pengeluaran atau belanja pemerintah akan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa publik bagi masyarakat. Wagner juga menegaskan adanya perbedaan tingkat belanja pemerintah pusat dan daerah yang disebabkan oleh perbedaan beban tugas dan kewajiban.

Belanja pemerintah dibedakan untuk mendukung kegiatan operasional atau administrasi

pemerintahan, dan kegiatan pembangunan. Berbagai studi menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah yang mempunyai dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pengurangan kemiskinan adalah belanja modal, belanja pendidikan dan belanja kesehatan.

2. Metode Penelitian

3.1 Kerangka Pemikiran

Belanja pemerintah daerah merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal akan meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana publik seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, waduk pelabuhan dan bangunan gedung. Kenaikan belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan sekaligus menciptakan pendapatan bagi masyarakat miskin sehingga akan mengurangi angka kemiskinan.

Belanja pemerintah daerah untuk kesehatan akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kematian ibu hamil dan bayi. Sedangkan belanja untuk pendidikan akan memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin (Brata, 2002; Cahyadi, 2005).

Belanja kesehatan dan belanja pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang sehingga tidak kalah pentingnya dengan belanja modal fisik. Investasi di bidang kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat dan sekaligus menurunkan angka kemiskinan (Cahyadi, 2005; Christy dan Priyo, 2009).

Penelitian ini mengambil studi kasus perubahan angka kemiskinan dan belanja pemerintah daerah Provinsi Jambi.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.

Model persamaan yang digunakan dalam menganalisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$\ln \text{Pov}_t = \alpha + \beta_1 \ln \text{PE}_t + \beta_1 \ln \text{RBMod}_t + \beta_2 \ln \text{RBKes}_t + \beta_3 \ln \text{RBPen}_t + u_t$$

di mana,

Pov adalah angka kemiskinan, PE=laju pertumbuhan ekonomi, RBMod=rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, RBKes=adalah rasio belanja daerah terhadap kesehatan, dan RBPen=rasio belanja Pendidikan terhadap total belanja daerah.

Dalam kajian dilakukan dua kali pengujian, yaitu pertama dengan memasukkan semua variabel independen; dan kedua dengan hanya memasukkan 3 variabel independent, yaitu: rasio belanja modal, rasio belanja kesehatan dan rasio belanja pendidikan.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan khususnya data belanja daerah Pemerintah Provinsi Jambi, dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi berupa angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tahun 2001 sampai tahun 2020.

3. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Analisis Data

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2001 mencapai 6,65 persen kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,35 persen. Dampak pandemi *Covid-19* menyebabkan kontraksi perekonomian Provinsi Jambi sehingga lajur pertumbuhan ekonomi menurun menjadi -0,46 pada tahun 2020.

Sementara angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun terus dari 14,24 persen pada tahun 2001 menjadi 8,40 persen pada tahun 2010 dan 7,58 persen pada tahun 2020. Pola penurunan kemiskinan selama dua dekade terakhir berjalan konsisten. Tantangan yang harus dihadapi adalah menjaga konsistensi dalam pengurangan kemiskinan, dan mendorong belanja daerah menjadi lebih berorientasi kepada pembangunan manusia.

Tabel 1:
Ringkasan Belanja Daerah Provinsi Jambi

No	Indikator	2001	2010	2020
1	Angka Kemiskinan	14,24	8,40	7,58
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,65	7,35	-0,46
3	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja	15,65	36,82	15,76
4	Rasio Belanja Kesehatan terhadap Total Belanja	7,43	9,25	13,21
5	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Total Belanja	9,12	12,06	34,56

Sumber: BPS dan Dirjen DJPK Kemenkeu diolah

Dari sisi belanja pemerintah daerah, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja bersifat fluktuatif dari 15,65 persen pada tahun 2001 menjadi 36,83 persen pada tahun 2010 dan 15,76 persen pada tahun 2020. Rasio belanja pendidikan dan rasio belanja kesehatan terhadap total belanja cenderung meningkat selama kurun waktu (2000-2020).

Ringkasan hasil analisis regresi uji 1 dengan memasukkan semua variabel independen dapat dituliskan persamaan sebagai berikut:

$$\ln \text{Pov} = 2,37 - 1,000 \ln \text{PE} - 1,886 \ln \text{RBMod} - 2,228 \ln \text{RBKes} - 0,314 \ln \text{RBPen}$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mempunyai hubungan negatif dengan angka kemiskinan, tapi hanya variabel belanja modal yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Temuan ini menjelaskan bahwa peran belanja modal pemerintah daerah sangat penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Setiap kenaikan belanja modal sebesar 1 persen akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,886 persen. Belanja modal akan menciptakan kesempatan kerja baru termasuk keluarga miskin sehingga memberikan peluang bagi penurunan angka kemiskinan.

Tabel 2:
Hasil Analisis Regresi Uji 1

Varabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig t
Konstanta	2,372	0,44	0,668
Laju Pertumbuhan Ekonomi (PE)	-1,000	-0,96	0,354
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (RBMod)	-1,886	-3,39	0,004
Rasio Belanja Kesehatan terhadap Total Belanja (RKes)	-2,228	-1,80	0,091
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Total Belanja (RBPend)	-0,314	-1,00	0,335
<i>R Square</i>	86,0		

Sumber: Hasil analisis.

Sementara, hasil analisis regresi uji 2 dengan mengeluarkan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dapat dituliskan persamaan sebagai berikut:

$$\text{InPov} = 2,52 - 1,557 \text{ InRBMod} \\ - 2,791 \text{ InRBKes} - 0,189 \text{ InRBPen}$$

Tabel 3:
Hasil Analisis Regresi Uji 2

Varabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig t
Konstanta	2,516	1,39	0,185
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (RBMod)	-1,5570	-3,58	0,003
Rasio Belanja Kesehatan terhadap Total Belanja (RKes)	-2,791	-2,58	0,020
Rasio Belanja Pendidikan terhadap Total Belanja (RBPend)	-0,189	-0,66	0,517
<i>R Square</i>	87,6		

Sumber: Hasil analisis.

Hasil regresi uji 2 hampir sama dengan hasil uji 1 bahwa variabel independen mempunyai hubungan negatif dengan angka kemiskinan. Dari ketiga variabel indepen, terbukti bahwa belanja modal dan belanja kesehatan memiliki pengaruh nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Jambi. Hasil ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan belanja daerah khususnya belanja modal dan belanja kesehatan dalam mengatasi kemiskinan.

4.2 Pembahasan

Dalam era otonomi daerah, peran pemerintah daerah melalui kebijakan belanja daerah menjadi kunci keberhasilan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai dampak langsung dan nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Jambi.

Peningkatan belanja modal mempunyai keterkaitan dengan penambahan barang modal yang diperlukan dalam peningkatan produksi barang dan jasa sebagai dasar tumbuhnya perekonomian daerah. Dampak berganda dari belanja modal adalah meningkatnya kapasitas produksi, meningkatnya permintaan bahan baku dan tenaga kerja, serta meningkatnya penciptaan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

Dalam kegiatan ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang, peluang kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mendapat manfaat dari kegiatan ekonomi daerah juga akan semakin besar. Dengan demikian penurunan angka kemiskinan akan terjadi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menentukan prioritas belanja modal pada sektor atau kegiatan ekonomi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat miskin terutama pertanian, perikanan, serta usaha kecil dan menengah. Langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah. Langkah lain yang sangat penting adalah mendorong penguatan rantai nilai yang melibatkan kelompok masyarakat miskin baik petani, buruh tani, nelayan dan pelaku usaha kecil lainnya sehingga mereka dapat menikmati nilai tambah dari kegiatan ekonomi.

Temuan lainnya adalah bahwa belanja kesehatan juga memberikan pengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan, sedangkan belanja pendidikan tidak berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan manfaat belanja kesehatan sangat diperlukan untuk bekerja dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sedangkan manfaat belanja pendidikan baru akan dirasakan dalam jangka panjang terutama melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4. Kesimpulan

Kebijakan belanja pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal dan belanja kesehatan mempunyai dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Peningkatan belanja modal akan mendorong proses akumulasi modal yang diperlukan dalam peningkatan kapasitas produksi, peningkatan permintaan bahan baku, perluasan kesempatan kerja, serta penciptaan nilai tambah dan pendapatan bagi masyarakat miskin.

Sedangkan kebijakan belanja kesehatan juga berpengaruh dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja,

dibantu dengan belanja pendidikan yang akan memberikan pengaruh dalam jangka panjang terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi.

Implikasi kebijakan dari hasil temuan tersebut adalah penajaman prioritas belanja daerah dengan memberikan porsi lebih besar kepada belanja yang langsung dirasakan oleh masyarakat miskin terutama belanja modal di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, dalam mempercepat upaya pengurangan kemiskinan pemerintah daerah harus memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk perluasan akses permodalan, teknologi, informasi dan pemasaran, serta perbaikan akses juga sarana dan prasarana kesehatan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2020. PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi.
- Bappenas. 2004. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Jakarta
- Brata, A.G. 2002. Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 07, No. 02, Hal.113-122.
- Cahyadi, E.P. 2005. Pelacakan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Bali). Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Christy, F.A. dan Priyo H.A. 2009. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Kualitas Pembangunan Manusia. *Jurnal National Conference UKWMS*, 10 Oktober. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Gujarati, D.N.2004. *Basic Econometrics*, 4th edition, New York: The McGraw-Hill Companies.
- Mankiw, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Terj. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukartini, Ni Made dan Samsubar Saleh. 2012. Pengujian Hukum Wagner dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Maret 2012. Volume 19 No 1: Hal. 1-24.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen. 2006. *Economic Development*. Seventh Edition. New York: Wesley Longman, Inc.